

## **SURVEI PERSEPSI ORANG TUA MENGENAI PROGRAM PAUD INKLUSI DI KOTA DENPASAR TAHUN 2020**

Ni Ketut Nila Suastariyani<sup>1</sup>, Luh Ayu Tirtayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Pendidikan Dasar  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [nilatari09@gmail.com](mailto:nilatari09@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayu.tirtayani@undiksha.ac.id](mailto:ayu.tirtayani@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi orang tua mengenai program PAUD inklusi. Persepsi orang tua dilihat dari aspek kebijakan pemerintah dan penerapan pendidikan inklusi. Penelitian dilaksanakan pada PAUD Inklusi di Kota Denpasar. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 154 orang tua siswa. Sampel dalam penelitian ditentukan menggunakan *multistage random sampling*, sehingga diperoleh 108 orang tua selaku responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan pilihan respon menggunakan skala *Likert*. Data dianalisis secara kuantitatif dengan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum persepsi orang tua terhadap kebijakan pemerintah mengenai program PAUD inklusi tergolong kurang baik. Hasil analisis menunjukkan persepsi dari sebagian besar orang tua (39,81%) terhadap kebijakan pemerintah mengenai program PAUD inklusi tergolong pada kategori kurang baik. Sebaran hasil lainnya adalah persepsi pada kategori sangat baik (7,14%), kategori baik (18,52%), dan kategori cukup baik (29,63%). Namun demikian, 4,63% responden memiliki persepsi akan PAUD inklusi pada kategori tidak baik. Persepsi orang tua atas aspek penerapan pendidikan inklusi secara umum dikategorikan cukup baik. Sebaran datanya adalah 6,48% orang tua menilainya pada kategori sangat baik, 20,37% pada kategori baik, 35,19% pada kategori cukup baik, 30,56% kategori kurang baik, dan 7,41% kategori tidak baik. Persepsi orang tua yang kurang baik mengenai program PAUD inklusi dapat menjadi salah satu penghambat keberhasilan pelaksanaan program ini di wilayah Kota Denpasar.

**Kata-Kata Kunci:** Persepsi, PAUD, pendidikan inklusi, orang tua, pendidikan khusus

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the perceptions of parents regarding the inclusion program of PAUD in Denpasar. Parents' perceptions are seen from aspects of government policy and the application of inclusive education. This research was conducted at the PAUD Inclusive in Denpasar. The population in this study consisted of 154 parents. The sample in this study was 108 parents which determined using multistage random sampling. The data collection method uses a questionnaire or questionnaire. Likert scale in the form of Checksilst is a questionnaire or questionnaire used in this study. The data analysis technique used in this study is descriptive statistics in the form of percentages. The results obtained in the study of parents' perceptions illustrate (1) the aspects of government policy in the category of very good 7.14%, good category 18.52%, good enough category 29.63%, bad category 39.81% and no category good 4.63%. Thus, in the aspect of government policy, the perception of parents is categorized as not good. (2) in the aspect of the application of inclusive education the very good category was 6.48%, the good category was 20.37%, the good enough category was 35.19%, the bad category was 30.56% and the bad category was 7.41%. This in aspects of the application of inclusive education, the perception of parents is quite good. The poor perception of parents regarding the PAUD inclusion program can be an obstacle to the successful implementation of this program in Denpasar.

**Keywords:** Perception, early childhood education, inclusion program, parents, special education

## PENDAHULUAN

Hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan dilindungi, tercantum dalam undang-undang 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa dalam memperoleh pendidikan setiap warga negara mempunyai kesempatan. UNESCO telah membuat gagasan “pendidikan untuk semua” atau “*Educational for All*” (Al Kahar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mengharuskan semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang perbedaan yang dimiliki setiap anak, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan.

Dalam memperoleh pendidikan semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Proses pelaksanaan pendidikan dari tingkatan PAUD sampai pendidikan tinggi tentu saja memiliki berbagai tantangan, seperti adanya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga pihak pelaksana pendidikan memberikan perhatian khusus dalam proses pembelajarannya. Penting untuk menyediakan suatu program pendidikan yang bisa mengakomodasi setiap kebutuhan anak baik untuk anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Dalam hal layanan pendidikan, anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda, karena anak berkebutuhan khusus dipandang sebagai hambatan. Agar proses pembelajaran tidak terganggu maka layanan pendidikannya harus terpisah.

Data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyatakan bahwa di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak sebanyak 1,6 juta orang. Berbagai faktor dapat menyebabkan rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan. Dimulai dari infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus pada sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi, serta pemahaman masyarakat yang kurang mengenai anak berkebutuhan khusus. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusi paling besar adalah kondisi masyarakat dan kondisi sosial. Selain itu pihak sekolah sebagai pelaksa pendidikan inklusi juga menjadi hambatannya (Ayu, Tirtayani, dan Abadi 2019). Berdasarkan permasalahan yang masih ditemui di lapangan, pemerintah semakin gencar menggalangannya adanya sekolah yang melaksanakan program dengan sistem inklusi.

Pendidikan inklusif merupakan gagasan baru dalam pendidikan yang menanamkan sikap anti diskriminasi, perjuangan hak dan kesempatan bagi semua, sebagai upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar, serta peningkatan mutu pendidikan (Hendrowati, 2017). Hal ini terlihat pada proses pembelajaran, peserta didik dan pendidik belajar bersama dalam suatu komunitas belajar. Guru menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, memberikan dukungan agar semua anak dapat berpartisipasi dengan aktif, serta memiliki komitmen dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Melalui pendidikan inklusi akan memberi ruang kepada semua anak untuk belajar sehingga kecakapan dan karakter pada peserta didik dapat dibentuk dengan cara yang bijak.

Penyesuaian dilakukan oleh pihak sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Penerapan pendidikan inklusi memiliki berbagai kendala dan tantangan yang perlu dicermati oleh penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu dari segi kebijakan pada sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru yang mengajar, *support system*, serta pemahaman dan implementasi pendidikan inklusi di lapangan (Retnaningtya dan Paramitha 2015). Dalam proses menentukan masa depan pendidikan anak, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi.

Peran orang tua serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Penerimaan, apresiasi terhadap keberadaan pendidikan inklusi dan turut serta dalam sosialisasi mengenai pendidikan inklusi merupakan salah satu bentuk keterlibatan orang tua dan masyarakat (Tejaningrum, 2017). Bagi orang tua anak reguler membiarkan keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus belajar di sekolah reguler juga sering menjadi pertanyaan, seperti apakah anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, apakah perhatian guru akan lebih terfokus pada anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak yang lain (Kusumawardani, 2011). Persepsi negatif dan sikap menolak terhadap penerapan pendidikan inklusi dapat disebabkan karena tidak adanya pengalaman

menangani anak berkebutuhan khusus, serta pemahaman yang kurang tentang anak berkebutuhan khusus dapat menimbulkan berbagai persepsi dari orang tua, khususnya orang tua siswa reguler.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam merespon kehadiran berbagai gejala yang ada disekitarnya. Rakhmat (dalam Donsu, 2016) mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu proses menyimpulkan informasi dan memperkirakan pesan yang diperoleh dari hasil pengamatan mengenai objek dalam peristiwa. Menurut Candra, Harini dan Sumirta (2017) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses penerimaan rangsangan oleh panca indra yang ditandai dengan timbulnya perhatian, mengakibatkan individu dapat menyadari maupun menghayati mengenai sesuatu yang sedang diamati baik secara luar maupun dalam individu tersebut. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan yang dilihat individu selanjutnya dilakukan penerjemahan stimulus yang masuk melalui panca indera. Perbedaan sudut pandang dalam pengamatan, akan menghasilkan perbedaan persepsi pada seseorang, sehingga terbentuk tanggapan yang terjadi pada seseorang dan memberikan penilaian pada sesuatu yang diamati berupa persepsi positif dan persepsi negatif.

Firmandhani, Setioko & Setyowati (2013) menyatakan persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: (1) Komponen kognitif yang cara berpikir seseorang dilihat dari pengetahuan, hasil pikiran dari seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman masalahnya. (2) Komponen afektif menyangkut faktor emosional seseorang dalam menilai suatu objek yang diamati berdasarkan perasaan, sikap dan emosi. (3) Komponen konatif/psikomototrik menyangkut pada perilaku seseorang terhadap objek saat keadaan tertentu. Persepsi individu dapat terbentuk terhadap objek pada lingkungan yang didapatkan dari stimulus yang sedang dihadapi.

Menurut Wiyani, (2016) PAUD adalah tempat untuk memberikan stimulus yang edukatif dilakukan oleh pendidik pada suatu Lembaga dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk membentuk dan mengembangkan berbagai potensi, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Pengembangan anak usia dini dilakukan dengan mengoptimalkan perkembangan kognitif dan bahasa. Pendidikan inklusi menurut Subini (2014) adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara bersama dalam sebuah kelompok secara menyeluruh, termasuk juga anak berkebutuhan khusus bai dari jenjang pendidikan TK hingga SMA. Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan (Widyawati, 2017).

Berdasarkan pemaparan para ahli kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa program paud inklusi adalah program pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa memanda status maupun latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan inklusi dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan potensi yang semua peserta didik, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan dengan mengikuti pembelajaran bersama di dalam kelas biasa.

Kebijakan pemerintah berhubungan dengan masalah dari publik maupun masalah pada pemerintah suatu negara. Kebijakan pemerintah/kebijakan publik dapat diartikan sebagai cara dalam penyelesaian suatu masalah dilihat dari rencana, program, keputusan dan sikap yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang berwenang atas rancangan yang telah disusun (Ramdhani, 2017). Tujuan yang dikemukakan dalam Permendiknas bahwa pendidikan inklusi memberikan peserta didik yang mengalami penyimpangan pada fisik, sosial, mental serta memiliki kecerdasan, untuk diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan dan mewujudkan sikap anti diskriminatif serta menghargai keaneka ragaman yang dimiliki oleh peserta didik.

Bagian yang terpenting dalam perencanaan pendidikan yang dapat mempengaruhi dan tujuan peserta didik pada Lembaga adalah kurikulum. Kurikulum digunakan sebagai acuan dalam mentukan isi pembelajaran, mekanisme, serta menentukan kualitas dari pendidikan, serta dijadikan tolak ukur dalam proses pembelajaran. Dalam program inklusi, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah biasa yang fleksibel, kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, hambatan, dan kemampuan peserta didik pada sekolah inklusi (Kustawan, 2016). Menurut Budiyanto (2017) mengungkapkan bahwa aspek utama yang harus

dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum antara lain. (1) Sasaran pendidikan sesuai dengan identitas dan tujuan pengembangan sekitar aktivitas pembelajaran secara umum. (2) Harapan siswa dalam bentuk aktivitas belajar secara umum. (3) Menentukan tentang apa yang diajarkan secara tim, materi dasar pendidikan, aktivitas dan waktu. (4) Menentukan pengajaran dalam bentuk tim, yang bertujuan agar siswa mau secara aktif ikut berpartisipasi.

Pernyataan yang dikemukakan oleh *Sapon-Shevin O'Neil* (dalam Garnida, 2015) mengemukakan bahwa anak yang berkelainan dapat dilayani pada sekolah terdekat, serta belajar bersama pada kelas reguler, merupakan persyaratan dalam melaksanakan layanan pendidikan inklusi. Proses penerimaan peserta didik baru disekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus agar diterima, serta dapat mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Tenaga pendik yang dimiliki sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu dipertimbangkan dalam proses penerimaan peserta didik baru khususnya anak berkebutuhan khusus. Upaya pemerataan pembagian peserta didik yang memiliki anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi, diatur dengan memberikan anak berkebutuhan khusus pada satu kelas paling sedikit terdapat satu anak berkebutuhan khusus, hal ini dilakukan agar pemberian layanan pendidikan yang optimal bagi semua peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus.

Mariyana (2016) menyatakan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan seperti perilaku, keterampilan, dan pengetahuan untuk dihayati dan dilaksanakan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya mengajar peserta didik. Pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena dalam penerapannya guru merupakan profesi yang menggunakan keahlian khusus dalam mengajar. Untuk menjadi pendidik diperlukan syarat khusus, yaitu harus memiliki standar akademik minimum Sarjana ataupun Diploma. Tugas guru dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya sekedar mengajar peserta didiknya, melainkan guru bertanggung jawab untuk membentuk karakter, mengembangkan rasa empati, dan menumbuhkan jiwa saling menghari kepada setiap peserta didiknya. Guru merupakan garda terdepan dalam menghantarkan keberhasilan untuk peserta didiknya. Guru yang dapat dikatakan sebagai tenaga pendidik profesional bukan guru yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Pada pelaksanaan pembelajaran guru harus dapat mengidentifikasi Menurut (Hermanto, 2008) mengemukakan bahwa guru yang profesional bukan lah guru yang ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri namun memberikan kerugian kepada siswanya. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan guru harus bisa mengidentifikasi kemampuan dari setiap peserta didiknya. Ketika guru dapat mengidentifikasi karakteristik dari setiap siswanya, maka guru akan dapat mengenali potensi peserta didiknya dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak tersebut.

Untuk menentukan keberhasilan dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusi, Selain kompetensi yang dimiliki oleh guru, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadikan proses pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif, sehingga semua harus dikelola dengan baik. (Banarwi, 2014) mengungkapkan bahwa sarana merupakan perangkat, perabotan, bahan yang digunakan secara langsung di sekolah, agar proses pembelajaran berlangsung teratur, efektif dan efisien. Menurut (Megasari, 2014) mengungkapkan prasarana adalah proses pengadaan serta pengawasan suatu tujuan dalam pendidikan. Berdasarkan pemapara teori para ahli dapat disimpulkan bahwa prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang dimiliki oleh sekolah berfungsi untuk dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran melalui proses pengadaan serta pengawasan.

Salah satu hal penting pada program pendidikan inklusi adalah penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Kemajuan anak berkebutuhan khusus tergantung dari perhatian dan penerimaan baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa tidak diterima dengan lingkungan disekitar sekolah seperti, teman bermain, tenaga pendidik, dan orang tua siswa akan menimbulkan gangguan pada psikis dan sosial anak yang menyebabkan anak tidak merasa senang berada di dalam sekolah. Menurut Hurlock dalam (Dulisanti, 2015) mengemukakan bahwa penerimaan sosial merupakan seseorang yang ditanggapi dengan positif keberadaannya, serta diterima baik dalam suatu kelompok untuk dijadikan anggota pada aktivitas tertentu.

Berdasarkan pemaparan pada konsep tersebut, kajian ini dilakukan untuk meneliti mengenai persepsi orang tua terhadap program PAUD inklusi yang ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah dan penerapan pendidikan inklusi di Kota Denpasar, Bali.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif tipe survei yang dilaksanakan pada PAUD inklusi di Kota Denpasar. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Penelitian dilakukan di PAUD inklusi yang tersebar pada 4 kecamatan yang berada di Kota Denpasar (lihat tabel 1).

Tabel 1.  
Sebaran responden penelitian

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Jumlah Subjek Penelitian
1.	Denpasar Utara	PAUD Dharma Negara	24
2.	Denpasar Timur	PAUD Davincio	24
3.	Denpasar Selatan	PAUD First Bright	35
4.	Denpasar Barat	PAUD Werdhi Kumara	27
Total			108

Dari tabel 1 tersebut diketahui jumlah subjek pada setiap kecamatan sekitar 24-35 sampel. Jumlah total sampel dari penelitian ini adalah 108 orang tua, baik dari kelompok A ataupun kelompok B.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini membahas tentang persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi yang dilihat dari aspek kebijakan pemerintah dan penerapan pendidikan inklusi. Pilihan jawaban yang disediakan dari kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan rentangan skor 1 hingga 4. Kuesioner yang digunakan telah memenuhi dari segi validitas dan reliabilitasnya. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Data disajikan dalam gambaran jumlah persentase per masing-masing aspek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner pada variabel persepsi yang terdiri dari 26 butir pernyataan. Pada aspek kebijakan pemerintah terdapat 13 butir pernyataan, dan pada aspek penerapan pendidikan inklusi terdapat 13 pernyataan. Hasil dari penelitian ini berupa data mentah disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2.  
Rekapitulasi hasil perhitungan skor

Aspek	Kebijakan Pemerintah	Penerapan Pendidikan pada PAUD Inklusi
Mean	42.06	39.99
Median	42	39.5
Modus	39	38
Standar Deviasi	4.138	4.031
Max	52	52
Min	30	28
Range	23	24

Sesuai rekapitulasi hasil perhitungan pada tabel 2, maka diketahui skor tertinggi pada aspek kebijakan pemerintah sebesar 52 dan skor terendah pada aspek kebijakan pemerintah sebesar 30, serta skor rata-rata dalam aspek kebijakan pemerintah sebesar 42.06. Standar deviasi pada aspek kebijakan pemerintah sebesar 4,138. Selanjutnya, analisis data terkait persepsi terhadap kebijakan pemerintah dipaparkan pada tabel 3.

Tabel 3.  
Tabel Distribusi Frekuensi Skor Aspek Kebijakan Pemerintah

Kelas Interval	Xi	Fi	Frekuensi Kumulatif	Frekuensi Relatif %
30-32	31	1	1	0.926
33-35	34	2	3	1.852
36-38	37	15	18	13.889
39-41	40	34	52	31.481
42-44	43	28	80	25.926
45-47	46	14	94	12.963
48-50	49	11	105	10.185
51-53	52	3	108	2.778
		108		100

Selanjutnya, persepsi orang tua terhadap program PAUD Inklusi pada aspek kebijakan pemerintah dapat diidentifikasi menggunakan nilai *mean* dan standar deviasi dengan perhitungan kategori sebagaimana pada tabel 4.

Tabel 4.  
Distribusi Frekuensi Kecenderungan Persepsi Orang Tua pada Aspek Kebijakan Pemerintah

No	Interval	Rentang skor	Frekuensi		Kategori
			Absolut	Persentase (%)	
1	$X \geq 48$	$X > 48$	8	7.41	Sangat Baik
2	$44 < X < 48$	45 – 48	20	18.52	Baik
3	$40 < X < 44$	41 – 44	32	29.63	Cukup Baik
4	$36 < X < 40$	37 – 40	43	39.81	Kurang baik
5	$X \leq 36$	$x \leq 36$	5	4.63	Tidak baik
Jumlah			108	100	

Tabel 5.  
Distribusi Frekuensi Skor Aspek Penerapan Pendidikan Inklusi

Kelas Interval	Xi	Fi	Frekuensi Kumulatif	Frekuensi Relatif %
24-27	25.5	0	0	0.000
28-31	29.5	1	1	0.926
32-35	33.5	12	13	11.111
36-39	37.5	41	54	37.963
40-43	41.5	33	87	30.556
44-47	45.5	18	105	16.667
48-51	49.5	2	107	1.852
52-55	53.5	1	108	0.926
Jumlah		108		100

Pada tabel 4 tersebut dapat dilihat kecenderungan persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi. Hasil yang menonjol pada frekuensi absolut sebanyak 43 dengan persentase 39,81%, menandakan bahwa persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi pada aspek kebijakan pemerintah dapat dikategorikan Kurang Baik. Berikutnya, data aspek penerapan pendidikan di PAUD inklusi disajikan pada tabel 5. Untuk menentukan persepsi orang tua terhadap program PAUD Inklusi pada aspek penerapan pendidikannya, maka perlu diidentifikasi menggunakan nilai *mean* dan standar deviasi dengan perhitungan pengkategorian yang disajikan pada tabel 6.

Tabel 6.  
Distribusi Frekuensi Kecenderungan Persepsi Orang Tua pada Aspek Penerapan Pendidikan

No	Interval	Rentang skor	Frekuensi		Kategori
			Absolut	Persentase (%)	
1	$X > 46$	$X > 46$	7	6.48	Sangat Baik
2	$42 < X \leq 46$	43 – 46	22	20.37	Baik
3	$38 < X \leq 42$	39 – 42	38	35.19	Cukup Baik
4	$34 < X \leq 38$	35 – 38	33	30.56	Kurang baik
5	$X \leq 34$	$x \leq 34$	8	7.41	Tidak baik
Jumlah			108	100	

Pada tabel 6 menunjukkan kecenderungan persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi pada aspek penerapan pendidikan inklusi, frekuensi terbanyak pada kelas interval 39-42 dengan frekuensi absolut sebanyak 38 dengan persentase 35,19%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi orang tua dilihat dari pemahaman, sikap dan perilaku orang tua mengenai proram PAUD Inklusi pada aspek penerapan pendidikan inklusi dapat dikategorikan cukup baik.

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar dari aspek kebijakan pemerintah menunjukkan hasil kurang baik. Hasil berbeda ditemukan pada persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar jika dilihat dari aspek penerapan pendidikan inklusi. Persepsi orang tua mengenai penerapan pendidikan inklusi tergolong cukup baik. Kecenderungan kurang baiknya persepsi orang tua dapat dilihat dari hasil analisis pada aspek kebijakan pemerintah. Temuan ini didukung dari penelitian sebelumnya oleh (Tirtayani, 2018), menyatakan bahwa pemerintah belum turun tangan sehingga orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus (autism) tidak dapat memilih sekolah, dan hanya bisa bersekolah di SLB. Pada indikator kebijakan program pemerintah (Ramdhani, 2017) menyatakan perlunya kebijakan pemerintah/kebijakan publik sebagai cara untuk mengatasi masalah, yang merupakan bentuk dari implementasi program, aktivitas, aksi, keputuasan maupun sikap yang dilaksanakan oleh beberapa pihak. Mendorong terwujudnya partisipasi penuh dari anak berkebutuhan khusus pada kehidupan masyarakat merupakan salah satu tujuan diadakan pendidikan inklusi.

Sesuai hasil kuesioner maka dapat diketahui bahwa ada orang tua yang tidak setuju dengan dicetuskannya program pendidikan inklusi oleh pemerintah, terutama di jenjang PAUD. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka penelitian sebelumnya dari Dewi, Tirtayani, dan Suniasih (2019) menunjukkan bahwa program pemerintah tergolong kurang efektif karena dukungan dari pemerintah yang kurang optimal. Kekecewaan juga dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tidak berkesesuaian satu sama lain serta kurang terpadu dan kurang membantu proses pelaksanaan

pendidikan pada sekolah inklusi. Dampaknya, kurikulum juga dirasa belum mampu diterapkan dengan baik serta kurang.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pemahaman orang tua mengenai PAUD inklusi sehingga berdampak pada pandangan yang berbeda terhadap program tersebut. Latar belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi orang tua dalam memberikan persepsinya. Sebagian besar orang tua dengan latar belakang pendidikan sarjana dan diploma menyatakan bahwa pemerintah harus membedakan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler. Pendapat tersebut didukung dari hasil penelitian sebelumnya (Kristiana, 2017), yakni orang tua lebih nyaman ketika anaknya tidak menempuh pendidikan bersama-sama dengan anak berkebutuhan khusus. Para orang tua mengharapkan agar anak berkebutuhan khusus belajar secara tersendiri. Para orang tua yang memiliki latar belakang SMA menyatakan ketidaksetujuannya jika sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dipisahkan. Arriani dan Wirhanto (2017) menyatakan bahwa untuk mendukung kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, diperlukannya kerjasama anatar masyarakat dengan orang tua dalam menumbuhkan rasa kepedulian yang nyata akan adanya anak bekebutuhan khusus. Orang tua yang menyatakan ketidaksetujuannya jika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak reguler dipengaruhi oleh keraguan akan kelancaran dalam proses pembelajarannya. Hal ini terlihat pada latar belakang pendidikan orang tua yang tidak setuju dengan adanya penggabungan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler.

Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi dapat menerima paling sedikit satu anak berkebutuhan khusus. Dari hasil penelitian orang tua siswa yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana menyatakan kesetujuannya jika penerimaan anak berkebutuhan khusus harus melalui tahap seleksi. Hal ini dilakukan agar anak yang berkebutuhan khusus dapat ditangani secara tepat dan baik. Tiga model kurikulum, yaitu kurikulum umum, kurikulum modifikasi dan kurikulum individual digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Model kurikulum ini dirancang agar anak berkebutuhan khusus juga mampu mengikuti pembelajaran pada sekolah inklusi tanpa merasa tertekan karena tidak dapat mengikuti pembelajarannya. hasil yang didapat melalui kuesioner pada kebijakan kurikulum telah menunjukkan hasil yang mendukung kurilukum perlu dirancang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

Pada aspek penerapan pendidikan inklusi, tergolong pada kategori sangat baik persentase 6,48%, tergolong ke dalam kategori baik dengan persentase 20,37%, pada kategori cukup baik menunjukkan persentase 35,19%, pada kategori kurang baik menunjukkan persentase 30,56% dan kategori tidak baik menunjukkan persentase 7,41%. Berdasarkan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar memiliki kecenderungan persepsi orang tuanya "cukup baik" dilihat dari persentase terbanyak terletak di atas rata-rata sebesar 35,19%.

Kecenderungan persepsi orang tua dikatakan cukup baik dilihat dari hasil analisis pada aspek penerapan pendidikan inklusi. Cukup baik persepsi orang tua diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya oleh (Waki, 2017) bahwa orang tua menyetujui penerapan pendidikan inklusi karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan.

Menurut Fitriani dan Usman (2017) kompetensi guru terlihat dari kemampuan guru dalam membentuk suatu karakter, mendidik, mengajar, serta mengapresiasi pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Dilihat dari indikator kompetensi guru orang tua merasa guru cukup mampu mengajar dikelas inklusi. Orang tua juga merasa guru mampu melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus secara efektif dan efisien. Karena dalam proses pembelajaran kompetensi guru memiliki peranan yang sangat penting, pada saat mengajar guru akan menentukan mutu pendidikannya melalui kompetensi yang dimilikinya. Menghadapi karakteristik yang berbeda dari anak-anak, keterampilan dan kemampuan dari guru harus dipersiapkan agar memberikan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran (Suwandayani, 2019). Hurlock (dalam Vivianti, Maulidiyah, & Santi 2019) mengungkapkan bahwa karakteristik seseorang yang bisa diterima oleh lingkungan sosialnya adalah merasa aman berada di tengah

lingkungan, merasa diterima di tengah lingkungan, merasa bebas. Menurut (Nilamsari, 2018) menyatakan bahwa orang tua memahami jika lingkungan yang dapat menerima perbedaan anak berkebutuhan khusus, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan baik. Pada PAUD inklusi dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan dapat melakukan interaksi sosial di lingkungan sekitarnya, saat lingkungan sekitarnya bisa menerima keadaannya yang berbeda.

## PENUTUP

Pelaksanaan program pendidikan inklusi ini diharapkan menjadi solusi dalam dunia pendidikan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus maupun anak reguler akan menimba ilmu bersama di dalam kelas biasa, sehingga dapat menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Kebijakan pemerintah menyelenggarakan program pendidikan inklusi kepada peserta didik yang mengalami penyimpangan pada segi dimensi kehisapan untuk diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan serta mewujudkan sikap anti diskriminatif dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi orang tua pada PAUD inklusi meliputi aspek kebijakan pemerintah tergolong dalam kategori kurang baik dengan persentase 39,81%, dan juga pada aspek penerapan pendidikan inklusi tergolong ke dalam kategori cukup baik dengan hasil persentase 35,19%. Maka dari itu pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif secara konsisten memerlukan adanya kesadaran yang mendalam dari berbagai pihak dan komponen. Komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat ditingkatkan melalui upaya melibatkan masyarakat khususnya orang tua dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan guna untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kahar, A.A.D. (2019). "Pendidikan Inklusif Sebagai Gebrakan Solutif "Education for All". *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Volume 11 Nomor 1, hlm 45-66. Tersedia pada <http://ejournal.stainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/182>
- Arriani, F., & Wirantho, S.A. (2017). "Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)". *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 3 Nomor 1. Tersedia pada <http://www.syekhnrurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady/article/view/1217>
- Ayu, N.M.L., Tirtayani, L.A., & Abadi, I.B.G.S. (2019). "Evaluasi Program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Ditinjau dari Hasil Belajar dan Perencanaan Program Lanjutan". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, Volume 7 Nomor 1, hlm 57-67. Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/18747>
- Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Candra, IW., Harini, I.G.A., & Sumirta., I.N. (2017). *Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dewi, N.P.A.S., Tirtayani, L.A., & Suniasih, N.W. (2019). "Efektivitas Program PAUD Inklusi di Kota Denpasar Ditinjau Dari Aspek Konteks". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, Volume 7, Nomor 1, hlm 1-12. Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/18731>
- Donsu, J.D.T. (2016). *Psikologi Keperawatan*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

- Dulisanti, R. (2015) "Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang". *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, Volume 2, Nomor 1. Tersedia pada <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/26>
- Firmandhani, S.W., Setioko, B., & Setyowati, E. (2013). "Faktor Pembentuk Persepsi Ruang Komunal di Pemukiman Nelayan (Studi Kasus: Pemukiman Nelayan Tambak Mulyo Semarang)". *Teknik*, Volume 34, Nomor 2, (hlm.95-101). Tersedia pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/5633/4998>
- Garnida, D. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT Radika Aditama.
- Hendrowati, T.Y. (2017). "Persepsi Orang Tua terhadap Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar di Provinsi Lampung". *Jurnal Fokus Konseling*, Volume 3 Nomor 1 (hlm78-84). Tersedia pada <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/article/view/293/0>
- Hermanto, H. (2008). "Kemampuan Guru Dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi". *Yogyakarta State University*. Tersedia pada <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132299486/penelitian/INKLUSI-DINAMIKA.pdf>
- Kustawan, D. (2016). *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*. Jakarta Timur:PT Luksima Metro Media.
- Kusumawardani, N.R. (2011). "Sikap Orang tua Reguler Terhadap Pendidikan Inklusi". Tersedia pada <http://eprints.umm.ac.id/32054/2/jiptummb--noviriakus-27364-2-babi.pdf>
- Mariyana, R. (2016). "Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Anak Usia Dini". *Jurnal Pedagogia*. Volume 12, Nomor 1, (hlm.1-18). Tersedia pada <https://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia/article/viewFile/3296/2282>
- Megasari, R. (2014). "Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi". *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1, hlm 636-648. Tersedia pada <http://103.216.87.80/index.php/bahana/article/view/3808>
- Nilamsari, N. (2018). "Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Guru Dalam Memahami Pendidikan Inklusi di TK Jasmine Jakarta Utara". *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Volume 1 Nomor 1, hlm 71-82. Tersedia pada <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/544>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M.A. (2017). "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, Volume 11 Nomor 1, hlm 1-12. Tersedia pada <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/5116>
- Retnaningtya, M. S., & Paramitha, P. P. (2015). "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Di TK Anak Ceria (Parental Involvement in Education at TK Anak Ceria)". *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Volume 4, Nomor 1. Tersedia pada <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jppp11a466eeb4full.pdf>
- Subini, N. (2014). *Pengembangan Pendidikan Inklusi Berbasis Potensi*. Jogjakarta: Redaksi Maxima.
- Suwandayani, B.I. (2019). "Penerapan Pendidikan Inklusi Berbasis Kontekstual di Sekolah Dasar". *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, Volume 3 Nomor 1, hlm 44-54. Tersedia pada <http://103.114.35.30/index.php/pgsd/article/view/2490>

- Tejaningrum, D. (2017). "Perspektif Orang tua Terhadap Implementasi Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak". *Jurnal Konseling Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.73-90). Tersedia pada <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jkp/article/view/766>
- Tirtayani, L.A. (2018). "Upaya Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus pada Lembaga-lembaga PAUD di Singaraja, Bali". *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, Volume 12, Nomor 2, 21-34. Tersedia pada <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/2817>
- Vivianti, A., Maulidiyah, S., & Santi, D. E. (2019) "Hubungan Penerimaan Sosial Dengan Asertivitas pada Mahasiswa yang Merantau". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 1, (hlm 245-253). Tersedia pada <http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/696>
- Waki, A. (2017). "Persepsi Orang tua Terhadap Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa-Barat". *Jurnal Basicedu*, Volume 1, Nomor 1, hlm 79-83. Tersedia pada <http://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/158>
- Widyawati, R. (2017). "Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, (hlm.109-120). Tersedia pada <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/1014>
- Wiyani, N.A. (2016). *Konsep Dasar PAUD*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.